



---

**PENGARUH PMA, PMDN, TPAK, PDRB PERKAPITA, PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN JAWA**

<sup>1</sup>Lorentino Togar Laut, <sup>1</sup>Arinda Sita Putri, <sup>3</sup>Yustirania Septiani

Ekonomi Pembangunan, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

[yustirania\\_septiani@untidar.ac.id](mailto:yustirania_septiani@untidar.ac.id)

---

**Info Artikel**

Sejarah Artikel:  
Diterima 11  
November 2002  
Disetujui 15  
Desember 2020  
Dipublikasikan 31  
Desember 2020

Kata Kunci :  
Disparitas  
pendapatan;  
Kesejahteraan  
Ekonomi;  
Pertumbuhan  
Ekonomi;

**Abstrak**

Distribusi pendapatan di Pulau Jawa masih belum merata, pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa belum mampu mencapai kesejahteraan ekonomi yang merata. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB perkapita, dan pengeluaran pemerintah terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa tahun 2008-2018. Jenis data adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Analisis data menggunakan regresi data panel Eviews 7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa tahun 2008-2018. Sedangkan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB perkapita, berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa tahun 2008-2018. Dari seluruh variabel berpengaruh secara simultan terhadap disparitas di Pulau Jawa tahun 2008-2018.

**Abstract**

Keywords :  
Income disparity;  
Economic  
Prosperity;  
Economic growth;

*The distribution of income in Java Island is still uneven, economic growth in Java has not been able to achieve equitable economic prosperity. So this study aims to determine how the effect of foreign investment, domestic investment, labor force participation rate, GDP per capita, and government spending on income disparities in Java in 2008-2018. The type of data is secondary data sourced from the Indonesian Central Bureau of Statistics and the Investment Coordinating Board. Data analysis used Eviews 7 panel data regression. The results showed that foreign investment, domestic investment and government spending did not have a significant effect on income disparities in Java in 2008-2018. Meanwhile, the variable of the level of labor force participation, GDP per capita, has a significant effect on income disparities in Java in 2008-2018. Of all the variables simultaneously influence disparities in Java in 2008-2018.*

## PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat dalam pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur, maka yang dikehendaki bangsa Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan hasil pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh wilayah selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut, tujuan wilayah melakukan pembangunan ekonomi adalah untuk mengejar ketertinggalan dan mensejajarkan diri dengan wilayah-wilayah yang sudah maju, baik dalam hal pendapatan, produktivitas, upah dan sebagai indikator ekonomi lainnya, sehingga gap (jurang) atau disparitas antar wilayah tersebut akan berkurang.

Disparitas pendapatan di Pulau Jawa dapat dilihat berdasarkan indikator atau suatu indeks ketimpangan pendapatan yang salah satunya adalah Gini Rasio. Koefisien Gini adalah sebuah ukuran disparitas atau ketidakmerataan (pendapatan/ kesejahteraan) agregat (keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol hingga satu (Todaro, 2006: 237).

Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan. Standar penilaian ketimpangan Menurut H. T. Oshima Gini Rasio (dalam Destiningsih. R, 2017)

Sumber: Badan Pusat Statistik 2008-2018, diolah

Gambar 1.1 Perbandingan Indeks Gini Pulau Jawa dengan Indonesia tahun 2008-2018.

Dari data diatas menunjukkan bahwa indeks gini Pulau Jawa dari tahun 2008 hingga tahun 2014 memiliki nilai indeks gini dibawah nilai indeks gini Nasional, namun dari tahun 2015 hingga tahun 2018, nilai indeks gini Pulau Jawa berfluktuatif melebihi indeks gini Nasional. Data diatas menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Pulau Jawa masih belum merata, pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa belum mampu mencapai kesejahteraan ekonomi yang merata dan melebihi nilai rata-rata indeks gini nasional selama tahun 2015 hingga tahun 2018.

Trade off atau pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan dimasing-masing daerah selalu terjadi. Menurut Kuznet distribusi pendapatan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2006: 254).

Sumber: Badan Pusat Statistik 2008-2018, diolah

Gambar 1.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Disparitas Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2008-2018.

Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi utamanya jika dilihat pada tahun 2009 hingga 2011, terdapat fakta dari teori bahwa negara-negara berkembang menghadapi sebuah trade off antara pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan. Setelah tahun 2011, kita melihat sebuah fenomena dimana pertumbuhan ekonomi yang memiliki tren menurun diiringi dengan ketimpangan pendapatan yang relatif stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa

mengalami kondisi dimana kesejahteraan masyarakat menjadi stagnan dikala pertumbuhan ekonomi melemah hingga tahun 2015. Dengan adanya level disparitas pendapatan yang sedang ini mengakibatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa yang kurang merata dan berpotensi mengalami disparitas pendapatan yang tinggi.

Besarnya sumbangan PDRB Pulau Jawa terhadap PDB Nasional ternyata masih menyisakan permasalahan ekonomi di Pulau Jawa itu sendiri, yaitu disparitas pendapatan yang ditunjukkan oleh PDRB per kapita. PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001: 79).

Sumber: Badan Pusat Statistik 2008-2018, diolah

Gambar 1.3 Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita atas Dasar Harga Konstan 2010 di Pulau Jawa 2008-2018 (Rupiah).

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata PDRB perkapita di Pulau Jawa dalam kurun waktu 2008-2018. Data tersebut mengindikasikan bahwa Pulau Jawa sendiri yang merupakan pusat perekonomian, pencapaian kesejahteraan ekonominya masih belum merata.

Pemerintah membutuhkan bantuan pihak swasta dalam rangka penyediaan atau penanaman modal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ada dua macam penanaman modal, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pulau Jawa membutuhkan penanaman modal asing untuk menumbuhkan perekonomian domestik. Penanaman Modal Asing hanya ditujukan untuk industri padat modal yang memiliki teknologi canggih, tenaga kerja yang berpendidikan serta berkeahlian, sehingga upah yang didapatkan lebih tinggi daripada perusahaan dalam negeri.

Sumber: Badan Pusat Statistik 2008-2018, diolah

Gambar 1.4 Rata-rata nilai realisasi Penanaman Modal Asing Provinsi di Pulau Jawa 2008-2018 (juta US\$).

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa terjadi perbedaan nilai realisasi penanaman modal asing di Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata nilai realisasi penanaman modal asing tertinggi dalam kurun waktu 2008 hingga 2018 yaitu sebesar US\$ 4.942,75 (juta). Sedangkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat tertinggal dengan nilai realisasi penanaman modal asing sebesar US\$ 39,82 (juta) dalam kurun waktu 2008-2018. Menurut Rosmeli (2015:368) Penanaman Modal Asing paling banyak pada sektor perindustrian yang lebih banyak padat modal di bandingkan padat karya serta sektor ini lebih banyak berada di pusat kota, sehingga memperbesar disparitas pendapatan. Selain itu, pemerintah juga memerlukan bantuan penanaman modal dalam negeri.

Sumber: Badan Pusat Statistik 2008-2018, diolah.

Gambar 1.5 Rata-rata Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Pulau Jawa 2008-2018 (Miliar Rupiah).

Dari gambar 1.4 tersebut, menunjukkan bahwa besarnya realisasi

penanaman modal di Pulau Jawa dalam kurun waktu 2008 hingga 2018 belum merata. Provinsi Jawa Timur adalah Provinsi dengan nilai realisasi investasi terbesar di Pulau Jawa dari 2008 hingga 2018 sebesar Rp 279.540,81 (miliar). sedangkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai realisasi investasi terkecil di Pulau Jawa yaitu sebesar Rp 9.103,48 (miliar). Perbedaan penanaman modal di masing-masing daerah di Pulau Jawa akan meningkatkan disparitas pendapatan, akan tetapi dalam jangka waktu yang panjang dengan adanya investasi akan dapat menurunkan tingkat disparitas apabila terjadi pemerataan penanaman modal di masing-masing daerah di Pulau Jawa.

Sementara itu tersedianya tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan dalam jumlah yang cukup dalam suatu wilayah merupakan sumber daya yang sangat berharga ketika dihadapkan pada permintaan tenaga kerja. Faktor ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan.

Tabel 1.1 Rata-rata TPAK Pulau Jawa tahun 2008-2018 (%).

Sumber: Badan Pusat Statistik 2008-2018, diolah

Dari data tersebut terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di enam provinsi di Pulau Jawa berbeda-beda. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi di Pulau Jawa yaitu sebesar 71,15%. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki nilai TPAK paling besar di Pulau Jawa nyatanya memiliki nilai PDRB Perkapita terendah di Pulau Jawa dalam kurun waktu 2008-2018. Dapat disimpulkan bahwa

tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi belum bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. Menurut Raharja dan Manurung (2008: 11-12), besarnya output nasional yang dihasilkan suatu perekonomian pada suatu periode tertentu memberikan gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, juga memberikan gambaran tentang produktivitas dan tingkat ke kemakmuran suatu negara.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2013:168).

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2008 - 2018, diolah

Gambar 1.6 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa tahun 2008-2018 (Ribu Rupiah).

Dari data diatas menunjukkan bahwa rata-rata realisasi pengeluaran pemerintah dari tahun 2008 hingga 2018 terbesar berada di Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia yaitu sebesar Rp 47.073.546.540 (ribu). Sedangkan rata-rata realisasi pengeluaran pemerintah paling rendah berada di Provinsi DI Yogyakarta, yaitu Rp 3.122.662.765 (ribu) dalam kurun waktu 2008-2018.

Pengeluaran pemerintah juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam perekonomian.

Wu dalam Ichvani (2019: 63) menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang erat antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dimana pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kebijakan pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan ketepatan arah investasi ke daerah-daerah yang dapat menciptakan kesempatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi apabila distribusi belum dapat dilakukan secara merata maka disparitas pendapatan antar daerah tetap akan terjadi, cenderung meningkat dan tidak lagi memberi ruang untuk masyarakat, terutama berpenghasilan rendah juga ikut ambil bagian dalam proses pembangunan (Danawati, dkk 2016: 2127).

Melihat fakta dan kondisi di 6 provinsi di Pulau Jawa yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui pengaruh dari PMA, PMDN, TPAK, PDRB Perkapita, dan Pengeluaran Pemerintah pada 6 provinsi di Pulau Jawa tahun 2012-2017 baik secara parsial maupun simultan.

## **METODE**

### **Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif metode deskriptif yang bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel dependen dengan variabel independent kemudian menjelaskan hasil dari pengolahan data tersebut. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan karakteristik dari suatu populasi tentang suatu fenomena yang diamati. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian

yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik/angka. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti (Suryani, 2015:109).

### **Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan variabel penanaman modal asing (X1), penanaman modal dalam negeri (X2), tingkat partisipasi angkatan kerja (X3), produk domestic regional perkapita (X4), pengeluaran pemerintah (X5) sebagai variabel independen, dan disparitas pendapatan sebagai variabel dependen (Y).

### **Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data yang dipilih adalah Disparitas Pendapatan yang diperoleh dari nilai Indeks Gini, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), PDRB Perkapita dan realisasi Pengeluaran Pemerintah dari enam Provinsi di Pulau Jawa tahun 2008-2018. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan mendapatkan informasi atau menyalin data yang sudah ada melalui jurnal, dokumentasi, dan lain lain yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

### **Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif, yaitu teknik analisis

yang dapat digunakan untuk menaksir parameter. Analisis data dilakukan dengan menguji secara statistik terhadap variabel-variabel yang telah dikumpulkan dengan regresi data panel melalui bantuan program EViews 7. Hasil analisis nantinya diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam menggunakan regresi data panel terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengestimasi model regresi yaitu Model Common Effect, Model Fixed Effect, Model Random Effect. Untuk menentukan model estimasi terbaik, sebelumnya dapat dilakukan uji kesesuaian model dengan Chow Test, Hausman Test, dan Lagrange Multiplier Test. Setelah ditemukannya model estimasi terbaik kemudian melakukan regresi data panel. Terakhir menentukan uji signifikansi dengan melakukan Uji Statistik yang terdiri dari Uji R<sup>2</sup>, Uji t, dan Uji F.

**Hasil dan Pembahasan**

Tabel 2.1 Hasil Pengujian Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
	21.04112	(5,5	
Cross-section F	4	5)	0.0000
Cross-section Chi-square	70.56224	5	0.0000

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel 2.1 diatas memperlihatkan bahwa nilai probabilitas chi-square bernilai 0,000. Sehingga dalam hal ini menyatakan bahwa H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima yang berarti model terbaik menurut uji chow adalah fixed effect.

**Uji Hausman**

Tabel 2.2 Hasil Pengujian Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	105.205	619	5
			0.0000

Sumber: Hasil penelitian 2019

Berdasarkan tabel 2.2 diatas memperlihatkan bahwa nilai probabilitas bernilai 0,0000. Sehingga dalam hal ini menyatakan bahwa H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima yang berarti model terbaik menurut uji hausman adalah fixed effect. Hasil uji chow dan uji hausman menyatakan bahwa model yang terbaik untuk regresi data panel dalam penelitian ini adalah fixed effect maka tidak perlu dilakukannya uji LM untuk mencari model yang terbaik.

Berdasarkan hasil regresi data panel Fixed Effect maka Disparitas Pendapatan di Pulau Jawa dapat diformulasikan dalam model sebagai berikut :

$$Y = -2.654899 + 0.003699X_1 + 0.000754X_2 + 0.008638X_3 + 0.176765X_4 - 0.027409X_5$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta = -2.654899 menunjukkan hasil bahwa jika variabel PMA, PMDN, TPAK, PDRB Perkapita, dan Pengeluaran Pemerintah dianggap konstan, maka nilai disparitas pendapatan mengalami penurunan sebesar sebesar 2.654899 % dengan asumsi variable lain tetap.

2. X1 (Penanaman Modal Asing) = 0.003699, yang artinya apabila terjadi peningkatan peringkat Penanaman Modal Asing sebesar 1 satuan dan variabel lainnya konstan, menunjukkan bahwa disparitas pendapatan akan meningkat sebesar 0.003699% dengan asumsi variabel lain tetap.
3. X2 (Penanaman Modal Dalam Negeri) = 0.000754, yang artinya apabila terjadi peningkatan peringkat Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 1 satuan dan variabel lainnya konstan, menunjukkan bahwa disparitas pendapatan akan meningkat sebesar 0.000754% dengan asumsi variabel lain tetap.
4. X3 (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) = 0.008638, yang artinya apabila terjadi peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 1 satuan dan variabel yang lain adalah konstan, menunjukkan bahwa disparitas pendapatan akan meningkat sebesar 0.008638%.
5. X4 (PDRB Perkapita) = 0.176765, yang artinya apabila terjadi peningkatan peringkat PDRB Perkapita sebesar 1 satuan dan variabel lainnya adalah konstan, menunjukkan bahwa disparitas pendapatan akan meningkat sebesar 0.176765% dengan asumsi variabel lain tetap.
6. X5 (Pengeluaran Pemerintah) = - 0.027409, yang artinya apabila terjadi peningkatan peringkat Pengeluaran Pemerintah sebesar 1 satuan dan variabel lainnya adalah konstan, menunjukkan bahwa disparitas pendapatan akan menurun sebesar 0.027409%.

Setelah uji regresi lalu dilakukan uji statistik yaitu dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar signifikansi dan pengaruh pada variabel bebas terhadap variabel terikat

### Uji Statistik

#### 1. Uji Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dilihat bahwa kemampuan variabel X mampu menjelaskan variabel Y sebesar 69,2920 %. Dengan demikian ada faktor lain yang memengaruhi disparitas pendapatan di Pulau Jawa yang tidak masuk dalam regresi ini sebesar 30,708

#### 2. Uji Parsial (Uji t)

##### a. Penanaman Modal Asing

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung X1 sebesar 0.864342 dan t tabel sebesar 1,99962. Maka, H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak. Hal ini karena nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel sehingga PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan.

##### b. Penanaman Modal Dalam Negeri

Berdasarkan hasil pengujian Regresi Data Panel Fixed Effect Eviews, dengan tingkat signifikansi 95 % ( $\alpha = 5\%$ ), diperoleh nilai t hitung X2 sebesar 0,218654 dan t tabel sebesar 1,99962. Maka, H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak. Hal ini karena nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel sehingga PMDN berpengaruh tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan.

##### c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan hasil pengujian Regresi Data Panel Fixed Effect Eviews dengan tingkat signifikansi 95 % ( $\alpha = 5\%$ ), diperoleh nilai t hitung X3

sebesar 3,493895 dan t tabel sebesar 1,99962. Maka, H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima. Hal ini karena nilai t hitung lebih besar t tabel sehingga TPAK berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan.

d. PDRB Perkapita

Berdasarkan hasil pengujian Regresi Data Panel Fixed Effect Eviews, dengan tingkat signifikansi 95 % ( $\alpha = 5\%$ ), diperoleh nilai t hitung X<sub>4</sub> sebesar 3,220195 dan t tabel sebesar 1,99962. Maka, H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima. Hal ini karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel sehingga PDRB Perkapita berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan

e. Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian Regresi Data Panel Fixed Effect Eviews, dengan tingkat signifikansi 95 % ( $\alpha = 5\%$ ), diperoleh nilai t hitung X<sub>5</sub> sebesar -1,652292 dan t tabel sebesar 1,99962. Maka, dapat disimpulkan bahwa nilai t tabel lebih besar dari t hitung dengan nilai signifikansi sebesar 0,1042 > 0,05. Sehingga Pengeluaran Pemerintah tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap disparitas pendapatan.

3. Uji Simultan (Uji F)

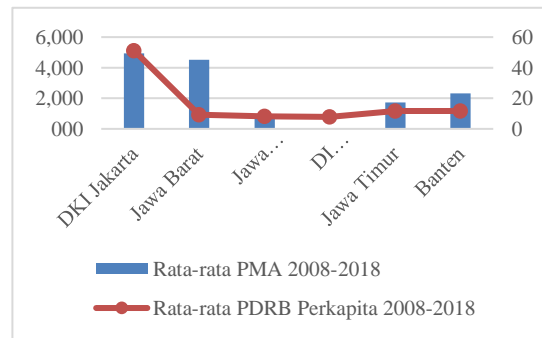
Berdasarkan Hasil Pengujian Regresi Data Panel Fixed Effect dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$  maka diperoleh F-tabel sebesar 2,52. F-hitung pada pengujian ini adalah 12,41064. Dapat disimpulkan bahwa F-hitung lebih besar dari F-tabel. Maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>6</sub> diterima yang berarti bahwa PMA, PMDN, TPAK, dan PDRB Perkapita, dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap Disparitas Pendapatan.

**PEMBAHASAN**

Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Disparitas Pendapatan

Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa tahun 2008-2018. Tidak berpengaruhnya PMA terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa investor asing cenderung tertarik menanamkan modalnya apabila PDRB per kapita di provinsi dan pada tahun tersebut tinggi, investor cenderung memilih menanamkan modalnya didaerah dengan pendapatan perkapita yang tinggi. Hal ini karena daya beli masyarakat akan lebih tinggi sehingga investor mendapatkan keuntungan yang tinggi dan pengembalian modal investasi yang lebih cepat.



Sumber: BPS 2008-2018, diolah  
 Gambar 3.1 Rata-rata Realisasi PMA (US\$) dan PDRB Perkapita (Rupiah) Pulau Jawa 2008-2018

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Pauzi, dkk (2016: 684) yang menyatakan bahwa keterbukaan penanaman modal asing tidak signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan



pendapatan (indeks gini). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramly (2012), yang menyatakan bahwa keterbukaan penanaman modal asing tidak signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan (indeks gini)

**Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Disparitas Pendapatan di Pulau Jawa**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan. Penanaman Modal Dalam Negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa tahun 2008-2018 dikarenakan pendistribusian penanaman modal yang tidak merata di setiap daerah di Pulau Jawa.

Tabel 3.1 Perbandingan rata-rata PMDN (Miliar Rupiah) dan Rasio Gini tahun 2008-2018

Provinsi	Rata-rata tahun 2008-2018	
	PMDN	Rasio Gini
DKI Jakarta	16.507,4	0,404
Jawa Barat	19.311,6	0,396
Jawa Tengah	11.484,2	0,363
DI Yogyakarta	910,3	0,415
Jawa Timur	25.412,8	0,375
Banten	8.240,5	0,389

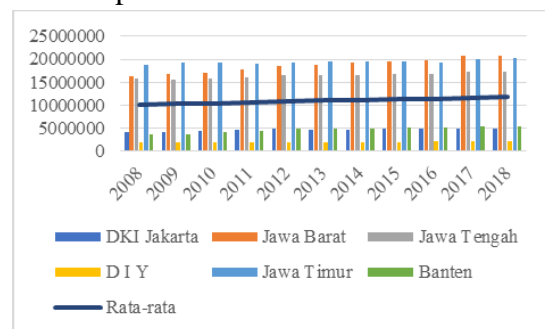
Sumber: Badan Pusat Statistik 2008-2018, diolah

Dalam tabel tersebut, menunjukkan bahwa rata-rata penanaman modal tertinggi terdapat di Jawa Timur, sedangkan indeks gini terendah berada di Jawa Tengah. Investor hanya memikirkan keuntungan dimana keuntungan tersebut hanya bisa didapatkan di daerah yang sudah maju . fasilitas dan akses juga menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rosmeli (2015: 368) yang menyatakan bahwa PMDN tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat dari Smith (Adisasmita, 2013: 47) yang mengatakan bahwa penanaman modal dilakukan karena para pemilik modal mengharapkan untung, dan harapan masa depan keutungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata.

**Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Disparitas Pendapatan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan. Pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa sangat mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja, semakin besar jumlah penduduk usia kerja maka secara otomatis jumlah angkatan kerja akan bertambah. Disamping itu, dibutuhkan terbukanya kesempatan kerja di Pulau Jawa. Peningkatan kesempatan kerja di Pulau Jawa dapat dilihat dari Grafik berikut:



Sumber: BPS 2008-2018, diolah

Gambar 3.2 Rata-rata perkembangan kesempatan kerja di Pulau Jawa Tahun 2008-2018 (Ribu)

Dari gambar tersebut, menunjukkan bahwa perkembangan rata-rata kesempatan kerja di Pulau Jawa

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan terbukanya kesempatan kerja yang ada akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga jika masyarakat sebagai penyedia tenaga kerja mampu terserap dengan baik maka masalah pengangguran dapat teratasi. Namun sebaliknya, jika pertambahan tenaga kerja tidak diimbangi oleh pertambahan kesempatan kerja yang diciptakan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru maupun ekspansi perusahaan dengan memperluas perusahaan, maka akan menambah jumlah pengangguran sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi regional.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Darzal (2016: 134) yang menyatakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Disparitas. Hal ini juga sesuai dengan Mulyadi (2014), bila peningkatan angkatan kerja seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja, berarti peningkatan TPAK diringi menurunnya partisipasi penduduk yang bekerja, sehingga pemicu tingginya TPAK adalah meningkatnya penduduk yang mencari pekerjaan, dan meningkatkan pengangguran.

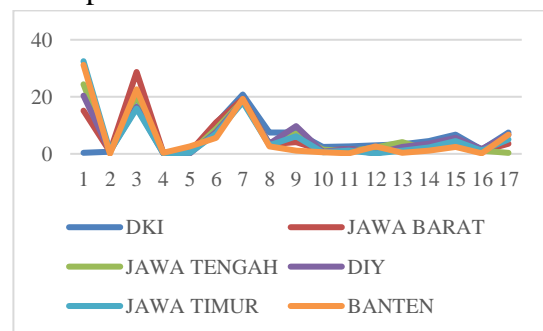
Pengaruh PDRB Perkapita terhadap Disparitas Pendapatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Perkapita berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan. Hal yang menyebabkan PDRB Perkapita berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan dikarenakan PDRB per Kapita yang dinilai dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat, dimana

PDRB per kapita merupakan rata-rata pendapatan penduduk, dimungkinkan tinggi karena terdapat sejumlah orang yang berpenghasilan sangat tinggi di dalam suatu wilayah. Selain itu, perbedaan pendapatan dari suatu sektor ekonomi dapat menjadi penyebab disparitas pendapatan.

Menurut Laporan Bank Dunia yang berjudul “Mempercepat Laju: Revitalisasi Pertumbuhan di Sektor Manufaktur Indonesia” menyatakan bahwa Indonesia akan mendapat keuntungan dari industri pengolahan atau manufaktur. Keuntungan dari bangkitnya industri manufaktur tersebut antara lain pertumbuhan yang berkualitas, pekerjaan yang lebih layak, dan pengurangan kesenjangan gender.

Namun, penyerapan tenaga kerja di sektor 3 belum merata. Berikut persentase penyerapan tenaga kerja per sektor se Jawa pada tahun 2018



Sumber: BPS 2018, diolah

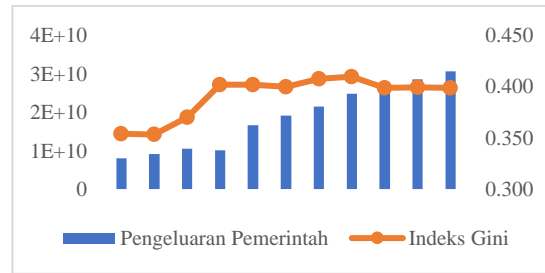
Gambar 3.3 Penyerapan tenaga kerja sektor Industri Pengolahan tahun 2018 (persen)

Dari gambar 4.15 diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja sektor industri terbesar terdapat di Jawa Barat sebesar 28,70 persen. Sedangkan Jawa Timur memiliki penyerapan tenaga kerja sektor Industri Pengolahan terendah yaitu sebesar 15,88 persen. Hal ini mendukung

penyataan di awal bahwa kenaikan PDRB per kapita belum mampu menggambarkan kesejahteraan masyarakat di Jawa dimana pendapatan yang tinggi hanya didominasi oleh sebagian kecil masyarakat.

Kuznet (dalam Lincolin, 2010: 292) menjelaskan bahwa pembangunan di suatu negara pada batas-batas tertentu dapat memicu timbulnya disparitas diantara warganya. Dalam analisisnya, Kuznets menemukan relasi antara tingkat kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita berbentuk U terbalik, yaitu menyatakan bahwa pada awal tahap pertumbuhan, distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk. Namun, pada tahap-tahap berikutnya, distribusi pendapatan akan membaik seiring meningkatnya pendapatan per kapita. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nurlaili (2016: 61) dimana PDRB Perkapita berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Disparitas Pendapatan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap disparitas pendapatan. Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja-belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu mempengaruhi terjadinya kesenjangan pendapatan, dimana belum meratanya pembangunan dan tidak terserapnya tenaga kerja yang dapat menambah pendapatan masyarakat.



Sumber: BPS 2008-2018 diolah

Gambar 3.4 Perbandingan Rata-rata Indeks Gini dengan Pengeluaran Pemerintah (Rupiah) di Pulau Jawa Tahun 2008-2018.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ifni Ariza (2017: 1) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gulo (2017: 57) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi.

PMA, PMDN, TPAK, PDRB Perkapita, dan Pengeluaran Pemerintah Berpengaruh Secara Simultan terhadap Disparitas Pendapatan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PMA, PMDN, TPAK, dan PDRB Perkapita, dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Disparitas Pendapatan. Dengan menggunakan hasil ini, pemerintah dapat mengetahui naik turunnya tingkat disparitas yang ada di Pulau Jawa dengan melihat besarnya nilai realisasi PMA, nilai realisasi PMDN, TPAK, PDRB Perkapita, dan Pengeluaran Pemerintah yang ada di Pulau Jawa..

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan Hasil Analisis Penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari hasil analisis dapat diketahui bahwa PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa tahun 2008-2018. Hal ini dikarenakan realisasi PMA yang berbeda di setiap daerah.
2. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa tahun 2008-2018. Hal ini disebabkan pendistribusian penanaman modal dalam negeri yang tidak merata di Pulau Jawa karena investor menginginkan keuntungan di daerah yang lebih maju.
3. Dilihat dari hasil analisis dapat diketahui bahwa TPAK berpengaruh signifikan terhadap Disparitas Pendapatan di Pulau Jawa tahun 2008-2018. Hal ini dikarenakan penambahan tenaga kerja tidak diimbangi oleh penambahan kesempatan kerja yang diciptakan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru maupun ekspansi perusahaan dengan memperluas perusahaan. sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan disparitas pendapatan.
4. Dilihat dari hasil analisis dapat diketahui bahwa PDRB Perkapita berpengaruh signifikan terhadap Disparitas Pendapatan di Pulau Jawa tahun 2008-2018. Hal ini dikarenakan

PDRB per kapita yang merupakan rata-rata pendapatan penduduk dimungkinkan tinggi karena terdapat sejumlah orang yang berpenghasilan sangat tinggi di dalam suatu wilayah

5. Dilihat dari hasil analisis dapat diketahui bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Disparitas Pendapatan di Pulau Jawa tahun 2008-2018. Hal ini berarti pengeluaran pemerintah belum mampu menurunkan tingkat disparitas pendapatan masyarakat.
6. Secara bersama-sama variabel PMA, PMDN, TPAK, PDRB Perkapita, dan Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa tahun 2008-2018. Hal ini dikarenakan semakin banyak penanaman modal yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak didukung dengan alokasi pengeluaran pemerintah yang tepat sehingga disparitas pendapatan dapat berkurang.

### Saran

1. Pemerintah dapat memberikan insentif pembebasan pajak bagi investor yang bersedia menanamkan modalnya di daerah yang tertinggal, mempermudah izin penanaman modal, agar investor tertarik menanamkan modalnya di daerah tersebut.
2. Pemerintah harus dapat mengupayakan iklim investasi yang kondusif, menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan keamanan negara dan regulasi yang tepat agar para investor dapat merasa aman dan

tertarik untuk menanamkan modal mereka sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Penyediaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya baik dengan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih berorientasi pada program padat karya maupun perluasan dari lapangan kerja sebelumnya merupakan kebijakan untuk mengurangi pengangguran yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas pendapatan antar provinsi di Pulau Jawa.
4. Peningkatan produksi dalam negeri dan perlu kesadaran masyarakat untuk menggunakan barang produksi dalam negeri. Sehingga semakin jumlah penduduk bertambah maka konsumsi masyarakat pun bertambah yang akan meningkatkan PDRB Per Kapita.
5. Pemerintah harus menyikapinya dengan serius dan hati-hati khususnya dalam penetapan anggaran belanja dan pendistribusian belanja atau pengeluaran pemerintah tersebut. Bagi pemerintah daerah hendaknya dapat mengalokasikan dan mengelola anggaran pengeluaran pemerintah dengan lebih baik dan dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Pemerintah dalam programnya disamping mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diharapkan pula mampu lebih intensif melaksanakan upaya pemerataan distribusi pendapatan serta pembangunan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariza, Ifni. 2017. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesenjangan Pendapatan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal. Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Vol. 01, No. 01, Pp 1-15
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi ke-5*. Yogyakarta: STIEM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Pusat. *Berita Resmi Statistik 2018*. Indonesia: BPS.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2018. *Penanaman Modal Asing*. Indonesia. BKPM
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2018. *Penanaman Modal Dalam Negeri*. Indonesia. BKPM
- Danawati, Sri., Bendesa, I. K. G dan Suyana Utama, Made. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Volume 5. Nomor 7. Pp 2123-2157
- Destiningsih, R., 2019. *Ekonomi Pengembangan Regional*. Yogyakarta: Graha Cendekia
- Darzal. 2016. Analisis Disparitas Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Jambi. *Jambi. Universitas Jambi*, Volume 4, Nomor 2, pp 131-139
- Gulo, Alberd Kurniawan, dkk. 2017. Dampak alokasi belanja langsung terhadap ketimpangan ekonomi wilayah (Studi kasus Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu). *Jurnal*

Paradigma Ekonomi. Universitas Jambi. Pp 57-66 Vol. 12 No. 2

Ichvani, Lutfiana Fiqry dan Hadi Sasana. 2019. Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean 5. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan). Universitas Tidar. Pp 61-73 Vol. 4 No. 1

Mulyadi, Subri. 2014. Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers,.

ulyadi, Subri. 2014. Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers

Nurlaili, Ani. 2016 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2007-2013. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.

Pauzi, Ahmad, dkk. 2016 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Secara Langsung maupun Tidak Langsung Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali. Jurnal EP Universitas Udayana Vol.5 No.6 Pp 668-691

Raharja, P., & Mandala, M. 2008. Teori ekonomi makro. Suatu pengantar. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ramly, Fahrudin. Determinan Ketimpangan Regional Di Indonesia Tahun 2000- 2008.. Universitas Pattimura.Ambon. Jurnal Volume 2 Nomor 1

Rosmeli. 2015. Dampak Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Jurnal Paradigma Ekonomika. Universitas Jambi. Vol.10, No.2, Pp 362-369

Suryani dan Hendryadi. 2015. Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Thamrin Simanjuntak. 2001, Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN  
Todaro, M. 2006. Pengembangan Ekonomi Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga